



Serangan Fajar Cederai Kualitas Pemilu di Kota Pelajar

YOGYA, TRIBUN - Proses pemungutan suara dan tahapan-tahapan Pemilu 2024 di Kota Yogya relatif berjalan lancar tanpa kendala berarti. Namun, di sektor non teknis, fenomena *money politics* atau yang akrab dengan sebutan serangan fajar, rupanya masih marak terjadi di Kota Pelajar.

Koordinator Komite Independen Sadar Pemilu, Moch Edward Trias Pahlevi, menyampaikan, pihaknya mengulirkan pemantauan di lima provinsi. Salah satunya adalah DI Yogyakarta yang mencakup lima kabupaten dan satu kota, di mana khusus Kota Yogya terdapat enam kemantren yang dipantau.

"Secara keseluruhan, dalam penyelenggaraan teknis, Kota Yogya termasuk baik, tidak ada kesalahan yang fundamental," katanya, di sela diskusi "Mengawal Demokrasi Bersama Tribun Jogja", Kamis (29/2).

Akan tetapi, ketika bergeser ke sisi non teknis, ia pun tidak memungkiri, masih menjumpai banyak kasus serangan fajar di seputaran Kota Yogya. Menurutnya, fenomena tersebut memang sama sekali tidak mengganggu kondusivitas di tengah masyarakat, namun berpotensi menurunkan kualitas Pemilu.

"Itu banyak kita temukan, (nominalnya) antara Rp100 ribu, sampai Rp150 ribu. Kemudian ada yang sistem paket, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota, itu banyak kita temukan," terangnya.

"Ini menjadi salah satu persoalan kualitas pemilihan, bukan kuantitas yang datang ke TPS. Ini catatan untuk demokrasi substansi kedepan," urai Edward.

Selain maraknya *money politics*, salah satu polemik yang muncul di Kota Yogya imbas Pemilu 2024 adalah semrawutnya data pada

aplikasi Sirekap. Bukan tanpa alasan, aplikasi yang seharusnya jadi alat bantu untuk memantau proses penghitungan suara, malah berubah jadi sarana saling tuding antar pendukung peserta Pemilu.

"Karena persoalan-persoalan seperti aplikasi Sirekap itu berpotensi membuat situasi di tengah masyarakat menjadi tidak kondusif, ya," tandasnya.

Sementara itu, Surveyor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta, Iput Yuliyanto, mengatakan, bahwa pihaknya pun menampakkan beragam permasalahan tersebut. Sebab, Badan Kesbangpol telah mengerahkan surveyor ke lima daerah pemilihan (dapil), di mana setiap tim diisi oleh tujuh personel.

"Sehingga, hal-hal yang menyangkut tahapan Pemilu dan kondusifitas lingkungan kita susun secara rutin dan dilaporkan secara berjenjang," ujarnya.

Dari sisi teknis, ia meyakini dan berani menjamin, penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogya sudah selaras dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja, Iput menyebut, terdapat pekerjaan rumah untuk penyelenggara Pemilu, khususnya jajaran KPU, terkait akurasi aplikasi Sirekap, yang dewasa ini menjadi sumber potensi gesekan.

"Kedepan, penyelenggara Pemilu harus membuat kebijakan yang bisa meminimalkan kegaduhan yang saat ini hampir setiap hari kita dengar," pungkask Iput. (aka/ord)



DOK. TRIBUN JOGJA

DIALOG - Koordinator Komite Independen Sadar Pemilu, Moch Edward Trias Pahlevi dan Surveyor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta, Iput Yuliyanto, dalam diskusi Mengawal Demokrasi Bersama Tribun Jogja, Kamis (29/2).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005